**TUNTUTAN PROVISI dalam perkara perdata terhadap PENUNDAAN Pelaksanaan Lelang Eksekusi**

**atas Barang rampasan negara**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

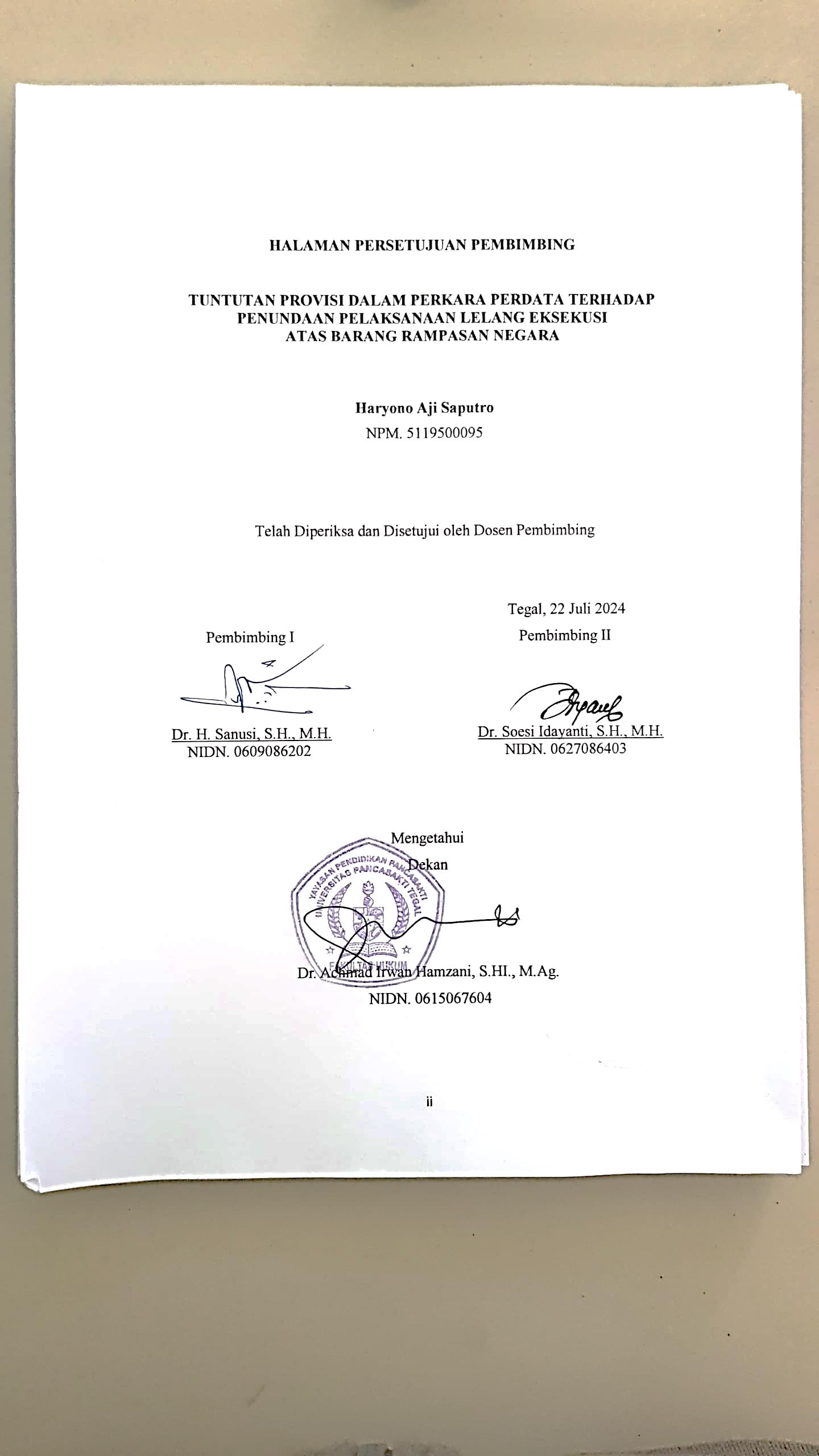
**Haryono Aji Saputro**

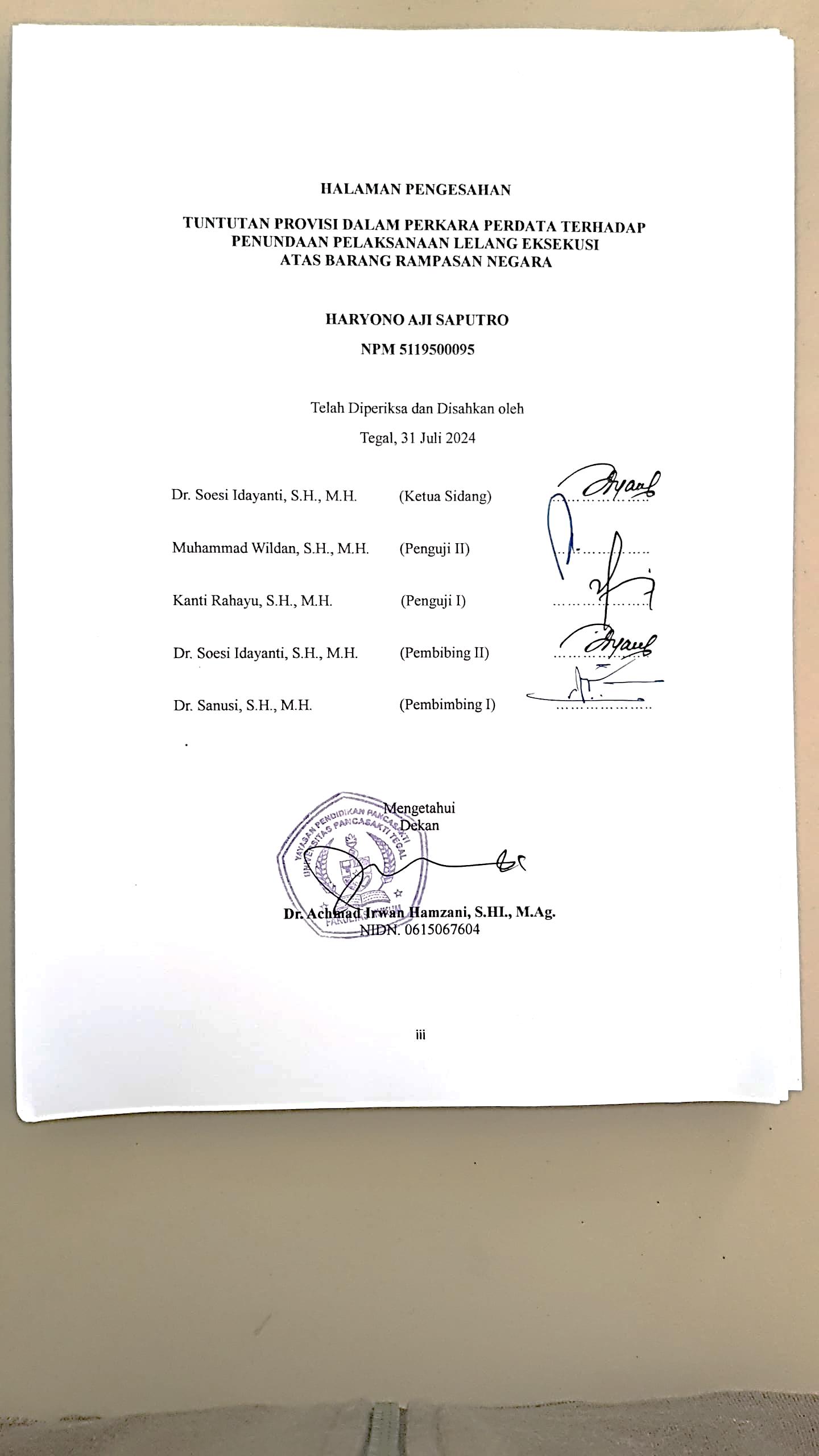
**NPM. 5119500095**

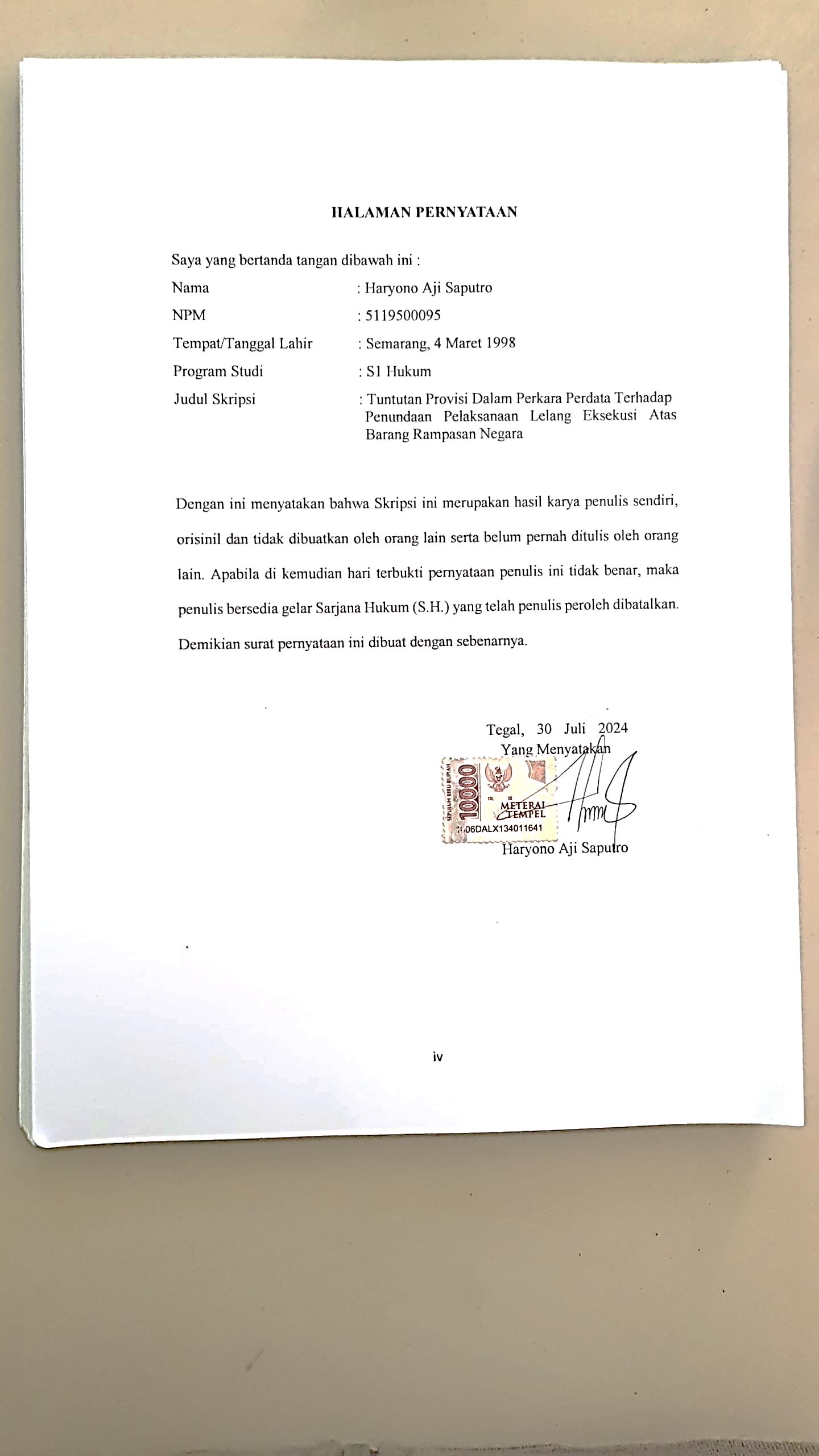
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**202**







**ABSTRAK**

“Tuntutan Provisi Dalam Perkara Perdata Terhadap Penundaan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Negara”. Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2024.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan tuntutan provisi dalam perkara perdata terhadap penundaan pelaksaan lelang eksekusi atas barang rampasan negara dan mengkaji akibat hukum hakim dalam menolak provisi terkait dengan penundaan lelang eksekusi atas barang rampasan negara pada putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa tinjauan literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Tuntutan provisi adalah permohonan keputusan sementara sebelum putusan akhir, untuk melindungi kepentingan sementara Eksekusi merupakan tindakan paksa untuk jalankan putusan jika tergugat tidak patuh. Penundaan lelang terjadi jika barang sudah disita dalam kasus pidana atau jaminan hutang dicairkan di luar lelang. Putusan provisi hanya diberikan oleh pengadilan tingkat pertama karena sifatnya yang mendesak. Akibat Hukum Hakim Dalam Menolak Provisi Terkait Dengan Penundaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Negara Pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs putusan, hakim memutuskan untuk menolak provisi yang diajukan oleh Pelawan. Penolakan provisi oleh hakim berarti bahwa permohonan Pelawan untuk menunda lelang eksekusi atas barang rampasan negara tidak dikabulkan. Akibat hukumnya adalah lelang eksekusi dapat dilanjutkan tanpa ada penundaan.

***Kata Kunci: Tuntutan Provisi, Lelang, Barang Rampasan***

**ABSTRACT**

"Provisions for Claims in Civil Cases Concerning Delays in Execution Auctions for State-Confiscated Goods". Thesis: Faculty of Law, Pancasakti University Tegal, 2024.

The aim of this research is to examine the provisions for demands for provisions in civil cases regarding the postponement of the execution auction for state confiscated goods and to examine the legal consequences of judges in rejecting provisions related to the postponement of the execution auction for state confiscated goods in decision number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. The method used in this research is descriptive method. This research uses secondary data, in the form of a literature review. The data analysis method used is qualitative.

The results of this research show that, a provisional claim is a request for a temporary decision before the final decision, to protect temporary interests. Execution is a forced action to carry out the decision if the defendant does not comply. Auction delays occur if the goods are already in a criminal case or debt collateral is disbursed outside the auction. Decision provisions are only given by the first level government because of their urgent nature. Legal Consequences of Judges in Rejecting Provisions Related to Postponing Execution Auctions for State-Confiscated Goods In Decision Number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs decision, the judge decided to reject the provisions imposed by Pelawan. The judge's rejection of the provisions meant that Pelawan's request to postpone the execution auction for the state's confiscated goods was not granted. The legal consequence is that the execution auction can continue without delay.

***Keywords: Provision Claims, Auction, Confiscated Goods***

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. Halaman persembahan ini juga ditujukkan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan dan memotivati saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak untuk semuanya yang telah mendukung dan meyemangati dalam perjuangan ini.

**HALAMAN MOTTO**

TETAP SEMANGAT, JAGA KESEHATAN, DAN JANGAN LUPA BAHAGIA !

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulilllahirabbil’alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tuntutan Provisi Dalam Perkara Perdata Terhadap Penundaan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Negara”**. Berbagai pihak telah menasihati, mendampingi, dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Sanusi, S.H., M.H. dan Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
9. Teman-teman yang penulis hormati dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kepada penulis selama kuliah hingga selesai.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Ketidakstabilan sosial dapat terjadi akibat gesekan yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Perselisihan muncul akibat ketegangan semacam ini ketika satu pihak merasa pihak lain tidak menghormati hak-haknya. Diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum yang relevan dan mengikat semua subjek hukum untuk membangun kembali hubungan ini melalui sistem hukum. Hal ini sangat penting untuk menghindari tindakan main hakim sendiri.[[1]](#footnote-1) Di sini, sistem peradilan berfungsi sebagai proses penyelesaian konflik.

Yang kami maksud ketika berbicara tentang peradilan di sini adalah proses penegakan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hak. Negara telah membentuk badan otonom yang menjalankan tugas ini, terlindungi dari campur tangan pihak luar. Putusan akhir dibuat oleh badan ini.[[2]](#footnote-2) Sebagai masalah hak sipil, mereka yang merasa dirugikan dapat mencari ganti rugi melalui sistem hukum dengan menggugat pihak yang mereka anggap bertanggung jawab atas kerugian yang mereka derita. Setiap pihak yang berkepentingan bebas untuk memimpin dalam menuntut hak-hak mereka. Ini merupakan contoh konsep menunggu dalam hukum acara perdata.

Untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, aturan diperlukan sebagai petunjuk untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang harus diakui dan dihormati oleh orang lain. Aturan hukum, yang melekat pada setiap negara dan berlaku untuk semua individu di dalam perbatasannya, merupakan landasan setiap peradaban. Badan-badan negara yang memiliki kekuasaan berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan kemudian menjalankan undang-undang ini.

Siapa pun yang yakin bahwa hak dan tanggung jawab hukum mereka telah dilanggar memiliki pilihan untuk memulai tindakan hukum dengan mengajukan gugatan tertulis atau lisan. Meskipun demikian, sangat tidak biasa bagi penggugat untuk mengajukan kasus secara lisan di pengadilan saat ini..[[3]](#footnote-3) Kadang kala, gugatan khusus diajukan terkait kasus utama untuk mendapatkan putusan sementara atas sebagian kasus sebelum putusan akhir, selain isi gugatan yang umum. Istilah "putusan sementara" dalam bahasa Inggris dan "provisionele eis" dalam bahasa Belanda menggambarkan putusan jangka pendek ini. Frasa "permintaan sementara" dapat memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda, termasuk penulisan hukum dan prosedur pengadilan. Provisionil berarti "sementara," bij vooraad berarti "sebelum," dan provisionileis berarti "permintaan sementara" dalam leksikon hukum Belanda-Indonesia yang diciptakan oleh Focklema Andrea. Putusan sementara atau keputusan dari pengadilan saat masalah utama sedang dipertimbangkan digambarkan sebagai provisionileis vonnis dalam Pasal 53 Rv.[[4]](#footnote-4)

Klaim sementara ditangani dengan keputusan sementara, yaitu putusan yang mengambil tindakan awal demi kepentingan salah satu pihak sebelum keputusan akhir dikeluarkan. Pihak terkait meminta keputusan ini agar mereka dapat melindungi kepentingan mereka. Tindakan sementara untuk salah satu pihak dalam kasus tersebut dapat ditentukan oleh putusan ini, yang relevan dengan kasus utama. Dengan sedikit keberuntungan, penggugat tidak akan menderita kerugian lebih lanjut, dan jika mereka menderita kerugian, pengadilan akan mempermudah mereka untuk melaksanakan pilihan mereka.[[5]](#footnote-5) Keputusan yang dibuat berdasarkan ketentuan ini dapat menyangkut hal-hal yang bukan merupakan bagian dari kasus utama tetapi memerlukan perhatian segera dalam mengelola masalah yang mendesak. Alasan penting dan terkait erat untuk gugatan atau permohonan harus disertakan dalam permohonan sementara; namun, alasan-alasan ini tidak boleh menjadi bagian dari kasus utama itu sendiri. Lebih lanjut, Penggugat atau Pemohon harus menentukan tindakan yang dimaksudkan dalam pengajuan.6

Misalnya saja perkara nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs, perkara perdata tingkat pertama. Pokok persoalan di sini adalah Wandi Safangat Bin Karsidin (Pimpinan II) merupakan Debitur di perusahaan Pelawan, yang merupakan perusahaan perseorangan berbadan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil, kredit mobil, dan kredit lainnya. Syarat dan ketentuan perjanjian ini sudah ditetapkan. Pelawan merupakan pemilik sah atas satu unit kendaraan, yaitu Mitsubishi FE349 MBRG/Light Truck tahun 2005, berwarna kuning, dengan nomor rangka MHMFE349E5R078046, nomor mesin 4D34 A22074, dan nomor polisi R1337LC, sesuai dengan perjanjian. Kunci kontak truk dan satu buah STNK milik Ir. Zaenal Abidin, warga Jalan Purwandaru RT.05/02 Kel. Bukateja Kab. Purbalingga juga turut serta dalam kendaraan tersebut. Perjanjian Pembiayaan Investasi yang memuat struktur pembayaran angsuran dan pengalihan hak milik melalui fidusia telah mengalihkan kendali kendaraan kepada Wandi Safangat (Tergugat II). No. W13.00333474.AH.05.01 Tahun 2019 dan No. 0580000504 dokumen Pembiayaan Investasi merupakan perjanjian ini. Meskipun demikian, mobil tersebut telah dihadirkan sebagai barang bukti dalam perkara 166/PID.SUS/2019/PN.Bbs yang melibatkan Dede Irawan Bin Tukin dan Wandi Safangat Bin Karsidin (Tergugat II). Putusan tersebut menetapkan terdakwa bersalah tanpa keraguan yang wajar, yang menyebabkan mobil Mitsubishi FE349 milik terdakwa disita untuk kepentingan negara. Mobil tersebut kini berada dalam kepemilikan terdakwa I, dan ia bermaksud untuk menjualnya atau menjadikannya sebagai barang sitaan. Karena kerugian finansial yang diderita dalam perkara perdata ini, Pihak Lawan mengajukan permohonan penangguhan sementara dalam gugatannya untuk menunda pelelangan dan pelaksanaan barang bukti selanjutnya.

Meskipun hakim belum menganggap putusan sementara tersebut sebagai putusan final, pada kenyataannya, ia tetap memutuskannya secara independen. Putusan selain putusan final tidak diputuskan secara terpisah, tetapi dimasukkan dalam risalah persidangan, menurut Pasal 185 HIR/196 RBg. Hal ini bertentangan dengan hal tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, putusan sementara yang direvisi atau diperkuat tersebut langsung digabungkan dengan putusan final setelah putusan final. Putusan yang dipercepat dapat didahulukan (Pasal 180 HIR dirujuk) karena kebutuhan mendesak untuk pelaksanaannya yang cepat. Keputusan ini diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan karena HIR tidak memuat persyaratan yang tepat yang menunjukkan kapan hakim harus mengizinkan atau menolak gugatan.

Dari apa yang dapat kita simpulkan dari uraian di atas, gugatan sementara adalah permintaan formal untuk ganti rugi sementara dari satu pihak kepada pihak lain sebelum adanya penetapan final. Meskipun kurangnya panduan yang jelas, pengadilan harus memprioritaskan hak penggugat dengan bertindak cepat atas tuntutan sementara, terutama mengingat potensi penundaan dalam meninjau kasus utama. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai tuntutan provisi dengan judul “Pertimbangan Hakim terhadap Tuntutan Provisi Penundaan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Rampasan Negara.”

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas isu yang akan diteliti dan mencapai tujuan penelitian hukum dengan efektif, penulis akan memfokuskan pada permasalahan pokok sebagai berikut:

* 1. Bagaimana ketentuan tuntutan provisi dalam perkara perdata terhadap penundaan pelaksaan lelang eksekusi atas barang rampasan negara ?
  2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak apabila hakim menolak provisi terkait dengan penundaan lelang eksekusi atas barang rampasan negara?

## **Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah:

* + 1. Mengkaji ketentuan gugatan sementara dalam perkara perdata yang melibatkan penundaan pelaksanaan lelang barang sitaan negara.
    2. Tujuan kedua adalah mengkaji putusan 4/Pdt.G/2020/PN Bbs, yang mana putusan tersebut menolak ketentuan yang dapat menunda pelaksanaan lelang barang sitaan negara.

## **Urgensi Penelitian**

* + 1. Menangani masalah yang relevan dalam praktik hukum perdata dengan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang ketentuan gugatan sementara dalam kasus perdata yang melibatkan penundaan lelang eksekusi barang sitaan negara.
    2. Dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs, pengadilan menolak ketentuan yang berkaitan dengan penundaan lelang eksekusi. Untuk membantu praktisi hukum menangani masalah serupa di masa mendatang, mohon analisis konsekuensi hukum dari putusan ini.

## **Tinjauan Pustaka**

Sejumlah penelitian telah meneliti kebutuhan pasokan dan pelaksanaan lelang atas aset yang disita negara. Namun, penelitian penulis mengungkap adanya perbedaan di antara makalah yang dikutip, termasuk makalah ini.

1. Rifai dan Triyono, “Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005”.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan temuan penelitian ini, telah ditetapkan bahwa negara tidak dapat menyelenggarakan lelang atas komoditas yang disita karena tindak pidana kehutanan, sebagaimana perintah pengadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa produk hutan yang diperoleh secara pidana tidak dapat dijual di lelang di hutan lindung karena pembatasan hukum. Dalam hal ini, pengadilan mengambil sikap progresif dalam pengambilan keputusan mereka, dengan mengeluarkan putusan yang berbunyi: "Barang bukti disita untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial" sehubungan dengan komoditas yang disita sebagai hasil kejahatan kehutanan. Metodologi penelitian ini sebanding dengan metodologi penulis. Namun, masalah yang dihadapi adalah di mana penelitian penulis berbeda. Penelitian Rifai dan Triyono mengenai topik bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut barang rampasan hasil tindak pidana kehutanan ini menarik untuk diteliti, namun fokus penulis adalah pada hal-hal yang bersifat spesifik terkait perkara perdata yang menyangkut penundaan lelang eksekusi barang rampasan negara dan akibat hukum apabila hakim menolak ketentuan mengenai penundaan lelang eksekusi dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2020 PN Bbs.

1. Prabandaru, “Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)”.[[7]](#footnote-7)

Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjadi dasar pelaksanaan lelang barang sitaan yang dibahas dalam penelitian ini. Persoalan ini bermula dari putusan-putusan Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang telah memberikan kekuatan hukum tetap terhadap penjualan barang sitaan melalui lelang. Metode lelang ini telah sesuai dengan semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi terdapat beberapa variabel yang menyebabkan pelaksanaannya kurang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat hukum dan masyarakat untuk melihat apa yang berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian, lokasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), efisiensi kinerja KPKNL Wilayah Malang, biaya-biaya yang dikeluarkan terkait barang sitaan, dan nilai ekonomisnya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian lelang barang sitaan oleh pihak terkait.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada cara merumuskan kesulitan-kesulitannya. Sementara sumber data dan dokumen hukum yang digunakan adalah tempat analisis ini sebanding dengan analisis lainnya.

1. Ferdian, “Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang”.[[8]](#footnote-8)

Setiap proses yang melibatkan penyitaan barang bukti harus mematuhi pedoman hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Barang koleksi yang menjadi sasaran penyitaan dan penjualan selanjutnya dianggap sebagai objek agunan yang diatur oleh kewajiban fidusia berdasarkan dokumen ini. Pendekatan hukum sosiologis dengan jenis studi deskriptif digunakan sebagai teknik penelitian. Data sekunder merupakan pelengkap data primer yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka; data sekunder diperoleh dari pengumpulan, penelitian, dan analisis teori dan hukum yang berlaku.

Menurut temuan penelitian, agar negara dapat menyita harta milik seseorang sesuai dengan perintah pengadilan yang tetap, harta milik tersebut harus merupakan milik pelaku dan terkait langsung dengan tindak pidana. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Penjualan Padang melakukan penjualan barang agunan fidusia yang disita oleh negara setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Padang. Sementara KPKNL mengawasi pelaksanaan lelang, Kejaksaan Negeri Padang melaksanakan putusan hakim. Mengikuti semua protokol dan hukum yang relevan, lelang dilakukan sesuai rencana. Pembeli barang jaminan fidusia yang disita untuk negara dalam lelang belum merasakan sepenuhnya putusan Pengadilan Negeri Padang. Masalah pengurusan surat kepemilikan dan keamanan mobil yang dibeli dalam lelang dari barang sitaan hanyalah dua contoh dari sekian banyak masalah yang muncul setelah penawar lelang ditetapkan sebagai pemenang.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dalam metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Meskipun demikian, isu yang diangkat berbeda-beda.

## **Metode Penelitian**

Dalam upaya mencari kebenaran, penelitian harus berpegang pada metode ilmiah dan cara berpikir ilmiah. Untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, penelitian ini menggunakan metode-metode berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang mengandalkan sumber-sumber sekunder sebagai sumber informasi. Pencarian dokumen menyediakan data penelitian. Penulis melakukan penelitian ini karena ia menggunakan berbagai sumber daring dan luring untuk datanya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pendekatan Statuta, yang meneliti undang-undang dan peraturan lain yang berdampak pada subjek hukum. Penelitian dalam hukum normatif berupaya mendefinisikan hukum dalam dua cara: pertama, sebagai substansi tekstual hukum (hukum dalam buku), dan kedua, sebagai standar dan pedoman untuk perilaku manusia yang tepat.[[9]](#footnote-9)

* 1. Sumber Data

Data Sekunder meliputi:

a. Dokumen hukum primer, yang mengikat secara hukum dan mencakup hukum-hukum dasar, merupakan contoh data sekunder.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang dapat memperkuat kredibilitas sumber-sumber primer yang digunakan untuk menyusun temuan-temuan penelitian ini. Yang termasuk dalam kategori ini adalah karya ilmiah seperti buku teks, esai, penelitian yang diterbitkan, opini, dan terbitan berkala hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

* 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengatasi masalah penelitian, penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara sistematis dan melakukan telaah pustaka secara menyeluruh. Data yang berkaitan dengan topik penelitian harus dicari, didokumentasikan, dikategorikan, dianalisis, dan ditinjau selama proses ini. Telaah pustaka merupakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

* 1. Metode Analisis Data

Menganalisis data memerlukan pengumpulan informasi secara metodis dengan tujuan untuk menarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang didefinisikan sebagai proses melihat informasi yang tidak dapat diukur atau dinilai menggunakan angka. Setelah semua data sekunder terkumpul, data tersebut akan diperiksa sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan isu penelitian. Untuk mencapai kesimpulan yang pasti, data dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis menggunakan gaya penjelasan tekstual.

## **Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bagian. Bagian-bagian tersebut disusun secara metodis sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan, memastikan bahwa semuanya saling cocok dengan sempurna. Mengingat hal-hal berikut:

Bab I : Bab pertama memberikan sinopsis penelitian, termasuk konteks, pernyataan isu, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi.

Bab II : Penjelasan terperinci tentang klaim sementara, ikhtisar komoditas yang disita sebagai bukti pelanggaran, dan Lelang Eksekusi Komoditas Negara yang Disita sebagai Bukti Kejahatan merupakan bagian dari bab ini.

Bab III :Memuat hasil-hasil penelitian serta diskusi yang berkaitan dengan

rumusan masalah.

Bab IV :Memuat kesimpulan dan saran.

# **BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**

## **Tinjauan Tentang Tuntutan Provisi**

Meminta putusan sementara dari pengadilan sebagai tindakan peralihan sebelum perkara memperoleh putusan tetap disebut gugatan sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Karena gugatan pokok diperlukan sebelum gugatan sementara dapat diajukan, maka gugatan pokok harus diajukan terlebih dahulu. Urgensi dan relevansi merupakan faktor penentu gugatan yang memerlukan tindakan sementara. Selain gugatan utama yang diuraikan dalam surat gugatan, gugatan sementara juga meminta pengadilan untuk memberikan putusan sementara yang bersifat mendesak.[[10]](#footnote-10)

Jika ada alasan untuk meyakini bahwa tergugat dapat menyembunyikan atau memindahkan harta bergerak yang dipermasalahkan, keputusan sementara dari gugatan perdata lain dapat digunakan. Dalam situasi seperti itu, hakim yang memimpin perselisihan dapat, untuk membantu salah satu pihak (penggugat), memberikan putusan awal yang berkaitan dengan isi kasus. Untuk mengajukan klaim sementara secara resmi, Anda harus melakukan hal berikut:

1. Nyatakan perlunya putusan sementara dan bagaimana putusan tersebut terkait dengan gugatan utama;
2. Berikan uraian terperinci tentang upaya hukum sementara yang Anda minta; dan
3. Pastikan tindakan tersebut tidak menyentuh inti perkara..[[11]](#footnote-11)

Apabila gugatan provisi muncul pada saat pemeriksaan gugatan, pemeriksaan perkara pokok akan tertunda. Pertama, pengadilan akan menggunakan cara cepat atau singkat untuk menangani gugatan provisi. Pasal 180 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa "putusan provisi, yaitu gugatan sementara yang harus diselesaikan sebelum putusan perkara pokok." Sekalipun perkara pokok belum ditetapkan, putusan provisi dapat dilaksanakan (dieksekusi) jika pengadilan menyetujui gugatan atau gugatan provisi. Putusan provisi dapat dilaksanakan sebelum putusan perkara pokok ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 55 RV, Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 10 ayat (1) HIR.

Putusan yang memberikan keringanan sementara kepada salah satu pihak dalam sengketa karena relevan dengan pokok perkara disebut putusan provisi. Putusan ini memuat prosedur sementara yang akan dilaksanakan sampai putusan akhir perkara pokok dikeluarkan; oleh karena itu, putusan ini dianggap sebagai putusan atau penghargaan sementara. Jadi, ketika menentukan tuntutan sementara, pengadilan dapat melakukan salah satu dari tiga hal berikut:

1. Menyatakan bahwa klaim atau tuntutan hukum mengenai ketentuan tidak dilayani.

Segala permintaan pasokan yang tidak mematuhi persyaratan resmi tidak akan dipertimbangkan.

1. Menolak gugatan sementara.

Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan sementara yang diminta tidak diperlukan dan tidak ada urgensi atau kaitan dengan klaim utama, maka hakim harus menolak klaim sementara.

1. Keputusan untuk mengabulkan gugatan sementara.

Dengan asumsi klaim tersebut memenuhi persyaratan formal, klaim sementara akan disetujui. Kedua, argumen pendukung klaim tersebut relevan dan peka terhadap waktu terhadap klaim utama. Ketiga, kerusakan serius akan terjadi jika tindakan sementara yang diperlukan tidak dilaksanakan.[[12]](#footnote-12)

Keputusan yang dibuat sementara sebelum keputusan akhir disebut keputusan sementara. Untuk melindungi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa, penyelesaian sementara dicari melalui penerbitan putusan sementara. Karena permohonan sementara tidak dapat dibuat tanpa adanya masalah yang dipersengketakan, maka permohonan diperlukan untuk membuat penetapan sementara. Sekalipun permohonan sementara dapat disertakan dengan permohonan peninjauan kembali dalam praktik pengadilan, majelis hakim tidak selalu dapat menanggapinya karena tidak memenuhi kriteria hukum atau kehilangan tujuan yang dimaksudkan. Karena putusan hakim sangat dibutuhkan, perkara ini dimintakan ketentuan pemeriksaan prioritas agar majelis hakim dapat mempercepat dan memberikan perhatian lebih daripada perkara lainnya.

Putusan seketika, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, memungkinkan pelaksanaan putusan sementara sebelum penetapan gugatan utama. Pasal 286 RV menambahkan, "putusan yang harus segera dilaksanakan tidak boleh merugikan perkara utama." Terdapat keadaan yang sangat sempit di mana Pasal 180 HIR dapat diterapkan. Terdapat pengecualian terbatas berdasarkan undang-undang yang memungkinkan keputusan dilaksanakan sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya keadaan tersebut, lebih sulit untuk melaksanakan pilihan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Tidak perlu memenuhi persyaratan yang terbatas dan tepat untuk mendapatkan putusan yang cepat. Di antara kondisi tersebut adalah:

Adanya suatu akta otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian (uitvoerbaar bij voorrad).

Masih ada putusan-putusan lain yang sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem).

Ada tuntutan ketentuan yang dikabulkan.

Perselisihan saat ini menyangkut *bezitrecht.[[13]](#footnote-13)*

Putusan sementara yang dibuat sebelum putusan akhir atas pokok perkara diatur dalam Pasal 185 HIR. Sekalipun pokok perkara belum ditetapkan, putusan tetap dapat dilaksanakan jika pengadilan menyetujui tuntutan sementara tersebut. Dalam gugatan pokok perkara, putusan sementara dibuat ketika tindakan sementara diambil untuk menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak. Untuk menangani masalah yang mendesak dengan segera, opsi ini sering digunakan dalam keadaan darurat. Berbeda dengan putusan akhir, putusan sementara mencakup putusan sementara.

Selain putusan sementara, hukum acara perdata juga mencakup putusan pendahuluan yang membantu mempersiapkan perkara dan putusan insidental yang menangani peristiwa atau kejadian tertentu, seperti memperbolehkan pihak tambahan untuk bergabung dalam perkara atau menyelesaikan penggabungan litigasi. Menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan sementara diminta oleh salah satu pihak dalam sengketa, dan keputusan untuk menangani gugatan tersebut merupakan putusan sementara.

Ada tiga kategori utama putusan atau diktum berdasarkan karakteristiknya:[[14]](#footnote-14)

1. Putusan Condemnatoir adalah amar putusan yang mencantumkan pernyataan seperti "menghukum dan seterusnya...".
2. Putusan Declaratoir adalah amar putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai hal yang sah menurut hukum.
3. Putusan Konstitutif adalah amar putusan yang menciptakan suatu kondisi baru.

## **Tinjauan Tentang Lelang**

### Pengertian Lelang

Lelang berasal dari kata Latin *"Auctio,"* yang artinya kenaikan harga secara bertahap. Praktik lelang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1908 selama periode kolonial Belanda. Landasan hukum untuk lelang diatur dalam Vendu Reglement (Stbl. 1908 Nomor 189) dan Vendu Instructie (Stbl. 1908 Nomor 190), yang masih menjadi pedoman utama untuk pelaksanaan lelang hingga saat ini. Menurut hukum, istilah lelang sebagai "penjualan di muka umum" dijelaskan dalam Vendu Reglement tanggal 28 Februari 1908 Pasal 1 Staatsblaad 1908 Nomor 189, yang menyatakan:

"Penjualan umum adalah proses lelang atau penjualan barang-barang kepada publik dengan penawaran harga yang naik atau turun, atau melalui penyampaian penawaran dalam amplop tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau diberi tahu sebelumnya mengenai kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan, atau menyampaikan penawaran dalam amplop tertutup."

Pasal 1 angka 17 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mendefinisikan lelang sebagai "setiap penjualan barang di hadapan umum dengan penawaran harga baik secara lisan maupun tertulis, melalui usaha untuk mengumpulkan peminat atau calon pembeli." Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan, di mana harga tersebut dapat naik atau turun.

Lelang atau penjualan komoditas yang terbuka untuk umum didefinisikan sebagai "penjualan umum" (openbare verkoop) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Penjualan. Metode ini melibatkan pemberian penawaran dengan harga yang dapat berubah, baik dengan mencantumkan harga dalam amplop tertutup atau dengan memberitahukan atau mengundang orang sebelum penjualan atau lelang. Dengan menerima penawaran terkini atau mengirimkan amplop tertutup berisi penawaran, pihak-pihak ini diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan mengajukan penawaran. Untuk memulai proses penjualan barang secara terbuka, petugas lelang akan membuat pemberitahuan untuk menarik minat calon pembeli. Bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik, barang-barang dihargai dalam lelang melalui sistem penawaran lisan yang dapat dinaikkan atau diturunkan, atau melalui penawaran tertulis. Lelang, menurut interpretasi Rochmat Soemitro, adalah cara bagi penjual untuk mengumpulkan calon pembeli secara terorganisasi yang memaksimalkan keuntungan mereka. Tiga elemen penting untuk lelang:

1. Penjualan umum wajib dilakukan dengan baik *(volledigheid).*
2. Harus ada kesungguhan untuk mengikat diri.
3. Pihak yang akan terlibat dalam perjanjian tidak boleh ditunjuk sebelumnya.

Harus ada petugas lelang yang berwenang hadir pada saat seluruh proses lelang. Jadi, lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dilakukan oleh juru lelang, di mana pembeli dan penjual melakukan penawaran harga secara terbuka, baik secara lisan dengan harga naik atau turun, maupun secara tertulis dengan penawaran harga tertutup. Penawaran harga ini harus dilakukan oleh atau di hadapan petugas lelang dan diawali dengan pengumuman untuk menarik perhatian calon pembeli.

Fungsi Lelang dibedakan atas fungsi privat dan fungsi publik adalah:

* + - * 1. Privat : Sebagai lembaga pasar yang menghubungkan penjual dengan pembeli, sehingga berperan dalam mengatur aliran perdagangan barang. Fungsi ini memberikan layanan kepada individu atau pengusaha yang ingin menjual barang melalui lelang, serta kepada para peserta lelang.
        2. Publik :

1. Menyediakan layanan penjualan untuk mengelola aset yang dikontrol oleh negara guna mempertinggi efisiensi dan ketertiban manajemen administrasi.
2. Menyelenggarakan jual beli barang dengan proses yang cepat, aman, tertib, dan mencapai harga yang wajar.
3. Mengumpulkan pendapatan negara melalui bea lelang dan kontribusi sosial.[[15]](#footnote-15)

Penawar tertinggi, sebagaimana ditegaskan oleh Pejabat Lelang, adalah pemenang lelang yang dinyatakan berdasarkan Pasal 1 angka 22 PMK tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang. Pejabat yang menyelenggarakan lelang bertanggung jawab untuk mencatat pemenang lelang dalam berita acara lelang setelah lelang eksekusi hak tanggungan. Lelang eksekusi hak tanggungan merupakan proses hukum yang sah yang menimbulkan tanggung jawab dan hak bagi pemenang lelang. Menurut Pedoman Pelaksanaan Lelang PMK (Pasal 71 ayat 1) dan Peraturan Vendu (Pasal 22), pemenang lelang yang sah harus membayar semua pajak dan pungutan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang yang dilelang tidak dapat diambil kembali oleh pemenang lelang jika ia tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Berita acara lelang, yaitu dokumen resmi sebagai bukti pelaksanaan, harus dibuat oleh penanggung jawab lelang. Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan lelang wajib menyusun laporan yang disebut berita acara lelang sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) PMK, yang membahas tentang pedoman pelaksanaan lelang. Dibuat oleh atau atas nama pejabat publik yang berwenang di tempat pembuatan dokumen, risalah lelang merupakan catatan resmi, yang didefinisikan sebagai catatan yang formatnya telah ditentukan oleh undang-undang. Dokumen yang mengikat secara hukum adalah dokumen yang mematuhi semua formulir yang berlaku dan ditandatangani oleh atau disaksikan oleh pejabat publik yang berwenang di tempat penandatanganan (Pasal 1868 KUH Perdata).

Pelaksanaan lelang perlu ditingkatkan kualitasnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

Faktor Internal:

* Aspek Administrasi: Penting untuk teliti dan berhati-hati dalam memeriksa setiap dokumen permohonan lelang yang diajukan oleh pemohon agar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Administrasi surat-surat dan pelaporan lelang di KPKNL harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-06/KN/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL.
* Aspek SDM: Kemampuan dan keterampilan pegawai, terutama yang bekerja di bagian lelang, perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menekankan prinsip ketelitian dan kehati-hatian serta mengikutsertakan pegawai dalam seminar, workshop, kursus, dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh BPLK atau lembaga lain. Sanksi tegas perlu diterapkan kepada pegawai yang melakukan tindakan merugikan negara dan masyarakat dalam menjalankan tugas lelang. Pejabat lelang harus selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.07/2006 Tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Faktor Eksternal:

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaksana lelang, yaitu meyakinkan para pemangku kepentingan/pemohon lelang dan pembeli bahwa lelang yang dilakukan oleh KPKNL adalah lelang yang efektif, murah, transparan, aman, sesuai dengan keinginan pembeli, dan mengandung kepastian hukum.

Tujuan utama lelang adalah menjual barang secepat mungkin tanpa memandang jenis barang yang dijual. Biasanya, penjual memerlukan layanan promosi, penawaran, dan pengiriman barang. Namun, Kantor Lelang Negara tidak dapat menyediakan layanan ini karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, Balai Lelang didirikan untuk menangani aspek-aspek lelang yang tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Sebagai contoh, Balai Lelang menyediakan layanan pra-lelang dan pasca-lelang, termasuk pengiriman barang dan pendanaan.[[16]](#footnote-16)

### Asas-Asas Lelang

Semua prosedur lelang harus mematuhi pedoman yang ditetapkan di dalamnya. Di antara dasar-dasar lelang adalah:

1. Asas keterbukaan

Kecuali dibatasi oleh undang-undang, konsep transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mengetahui rencana lelang dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ini berarti bahwa pengumuman diperlukan di awal setiap lelang.

1. Asas Keadilan

Pentingnya memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat untuk mencegah Petugas Lelang menunjukkan bias atau keberpihakan terhadap peserta lelang tertentu atau hanya mendukung kepentingan penjual.

1. Asas kepastian hukum

Menurut konsep kepastian hukum, semua pihak yang berpartisipasi dalam lelang harus dilindungi secara hukum. Semua pihak yang terlibat dalam lelang, termasuk penawar, penjual, dan Petugas Lelang, bergantung pada risalah yang dibuat oleh petugas untuk menegakkan dan menegakkan hak dan tanggung jawab masing-masing.

1. Asas efisiensi

Karena lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati dan peserta lelang langsung diverifikasi, maka proses lelang dapat berjalan lancar dan terjangkau.

1. Asas akuntabilitas

Pejabat Lelang wajib mengawasi penyelenggaraan lelang dan pengelolaan dana lelang agar lelang dapat terlaksana.

### Jenis – Jenis Lelang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, lelang meliputi:

1. Lelang Eksekusi

Untuk melaksanakan penetapan pengadilan, diperlukan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti lelang eksekusi atas perintah pengadilan atau lelang yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PPUN). 2. Lelang yang Wajib Dilaksanakan

1. Lelang Non Eksekusi Wajib

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lelang wajib dilaksanakan untuk menjual barang milik negara (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) atau milik badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

1. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Menjual barang milik perseorangan, organisasi masyarakat, atau badan usaha swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh pemiliknya dengan sukarela.

### Proses Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 mengatur tentang proses lelang di Indonesia:

1. Permohonan Lelang dari Pemlik Barang/Penjual

Untuk melakukan penjualan barang secara lelang di KPKNL, penjual harus mengajukan permohonan tertulis dan seluruh dokumen lelang yang diperlukan kepada Kepala KPKNL. Sedangkan untuk mendapatkan jadwal lelang dari Pejabat Lelang atau Kantor Kelas II, penjual harus mengajukan permohonan lelang tertulis disertai dengan dokumen yang diperlukan sesuai jenis lelang yang dikehendaki baik kepada Kepala Pejabat Lelang maupun Pejabat Lelang Kelas II.

Permohonan lelang harus disampaikan kepada bagian yang berwenang di KPKNL dalam bentuk surat resmi yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Piutang Negara.

Untuk mengajukan permohonan lelang Barang Milik Negara Non Eksekusi di KPKNL, terlebih dahulu harus menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada Kepala KPKNL yang berwenang dan harus ditandatangani. Penjual dapat secara proaktif menyampaikan surat permohonan lelang dan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Pimpinan KPKNL melalui email atau fax dalam hal dilaksanakan Lelang Eksekusi Benda Sitaan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP.

Penjualan melalui lelang memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

a. Adil, karena tidak ada pilih kasih atau bias lainnya dalam proses lelang; semua peserta dapat melihat dan berpartisipasi secara setara. Lelang yang objektif hanya dapat dilakukan jika semua peserta diperlakukan secara adil dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b. Aman, karena Petugas Lelang yang tidak memihak mengawasi, memimpin, dan melaksanakan lelang, melindungi pembeli lelang. Baik vendor maupun barang yang akan dijual harus dikonfirmasi secara resmi oleh Petugas Lelang. Harus ada pemberitahuan awal tentang lelang tersebut sehingga siapa pun yang ingin memprotes penjualan memiliki kesempatan untuk melakukannya.

c. Sederhana dan cepat karena lelang dimulai dengan pemberitahuan sehingga orang-orang dapat berkumpul pada hari lelang dan pemenang diumumkan dan dibayar tunai pada saat itu juga.

d. Menghasilkan harga yang adil karena proses penetapan harga lelang terbuka dan kompetitif.

e. Menegaskan kepastian hukum karena fakta bahwa penerbitan Risalah Lelang, sebuah catatan resmi dengan kekuatan pembuktian yang luas, berfungsi untuk mengakhiri setiap lelang.[[17]](#footnote-17)

Lelang barang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebuah instansi pemerintah. KPKNL merupakan instansi vertikal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Setelah menerima permohonan dari Kepala KPKNL, tata cara pelaksanaan lelang langsung ditangani oleh KPKNL. Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lelang Barang Milik Negara.:

1. Dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
2. Diumumkan terlebih dahulu untuk menarik calon penawar.
3. Dilaksanakan dengan harga atau tata cara lelang tertentu, baik tertulis maupun lisan, dengan unsur persaingan.
4. Peserta atau pembeli yang mengajukan penawaran harga tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.
5. Dilaksanakan di bawah pengawasan atau kehadiran Petugas Lelang.
6. Pelaksana lelang diwajibkan oleh undang-undang untuk menyimpan catatan terperinci tentang jalannya lelang dalam bentuk Berita Acara Lelang.

Lelang dapat dilakukan melalui dua prosedur berikut:

Lelang Terbuka: Prosedur ini dilakukan dengan penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga yang terus meningkat. Juru lelang memulai dengan harga batas tertentu, dan pemenangnya adalah peserta yang memberikan penawaran tertinggi. Metode ini adalah yang paling umum dikenal oleh masyarakat.

Lelang Tertutup: Prosedur ini dilakukan dengan para peserta lelang mengajukan penawaran mereka dalam amplop tertutup yang kemudian diserahkan kepada juru lelang. Saat lelang berlangsung, juru lelang akan membuka amplop satu per satu di hadapan semua peserta dan membacakan isi penawaran. Pemenangnya adalah yang memberikan penawaran tertinggi.

### Risalah Lelang

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang berwenang membuat dokumen resmi yang disebut Berita Acara Lelang, yang berfungsi sebagai catatan proses lelang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang luas. Pembuatan Berita Acara Lelang merupakan suatu keharusan karena berfungsi sebagai bukti resmi telah dilaksanakannya lelang. Keabsahan lelang yang dilakukan oleh juru lelang akan dipertanyakan apabila tidak ada berita acara lelang. Kepastian hukum dalam proses lelang dapat dipastikan dengan pencatatan yang teliti terhadap semua kejadian dalam berita acara lelang. Akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 KUH Perdata sebagai dokumen yang dibuat menurut bentuk yang disyaratkan undang-undang, baik oleh pejabat umum yang berwenang yang hadir di tempat pembuatan maupun oleh pejabat itu sendiri. Tiga komponen utama berita acara lelang yaitu::

1. Bagian kepala Risalah Lelang yang minimal mencakup:
   * + - 1. Tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan lelang yang tercatat dengan jelas;
         2. Nama lengkap dan jabatan Pejabat Lelang beserta tempat kedudukannya;
         3. Nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan Pejabat Lelang;
         4. Nama lengkap, pekerjaan, dan alamat penjual;
         5. Nomor dan tanggal surat permohonan lelang;
         6. Lokasi
2. Bagian Badan Risalah Lelang yang minimal mencakup:
   * + - 1. Jumlah penawaran sah yang masuk;
         2. Detail barang yang dilelang seperti nama, merek, jenis, jumlah, dan kondisi;
         3. Nama, pekerjaan, dan alamat pembeli yang memenangkan lelang atau yang mewakilkan;
         4. Harga penawaran dalam angka dan huruf;
         5. Daftar barang yang terjual dan yang ditahan, beserta nilai dan identitas peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi.
3. Bagian Kaki Risalah Lelang yang minimal mencakup:

Jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah total produk yang dilelang harus disebutkan.

Gunakan angka dan huruf untuk mencatat jumlah barang yang berhasil dijual.

Jumlah total kertas dan surat yang disertakan dalam Berita Acara Lelang harus disebutkan dengan jelas.

Rincian numerik dan tekstual yang menunjukkan ada atau tidaknya modifikasi diperlukan.

Untuk melelang barang bergerak, diperlukan tanda tangan Petugas Lelang, bersama dengan tanda tangan penjual atau kuasa penjual. Untuk melelang barang tidak bergerak, diperlukan tanda tangan pembeli atau kuasa pembeli, selain tanda tangan penjual atau kuasa penjual.

### Balai Lelang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 1 angka 44, Balai Lelang adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan khusus untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang lelang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk menyelenggarakan lelang noneksekusi sukarela atas permohonan penjual.

Balai Lelang adalah badan hukum swasta yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan atau penagihan terhadap debitur dan tidak boleh bertindak sebagai debt collector. Tugas Balai Lelang terbatas pada penyediaan layanan pra-lelang dan pasca-lelang, seperti mempersiapkan dokumen persyaratan lelang, memasarkan objek lelang, dan mengurus dokumen setelah lelang.[[18]](#footnote-18) Balai lelang, sebagai kuasa pemilik barang, dapat bertindak sebagai pemohon lelang atau penjual hanya untuk jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, yaitu:[[19]](#footnote-19)

Lelang untuk barang milik BUMN/D yang berbentuk Persero;

Lelang atas aset milik bank yang sedang dalam proses likuidasi, kecuali jika peraturan perundang-undangan menentukan hal lain.

Layanan pra-lelang yang disediakan oleh Balai Lelang mencakup, namun tidak terbatas pada:[[20]](#footnote-20)

1. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen terkait barang yang akan dilelang;
2. Menilai legalitas formal dari subjek dan objek lelang;
3. Menerima, mengumpulkan, memilah, memberi label, dan menyimpan barang yang akan dilelang;
4. Menguji kualitas dan menentukan nilai barang;
5. Meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang;
6. Mengatur asuransi untuk barang yang akan dilelang;
7. Memasarkan barang melalui metode yang efektif, menarik, dan terarah, seperti pengumuman, brosur, katalog, atau metode pemasaran lainnya; dan/atau
8. Menyiapkan atau menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan lelang.

### Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL) adalah instansi vertikal DJKN atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II. KPKNL adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang menjalankan kegiatan dan layanan lelang milik negara.[[21]](#footnote-21) KPKNL bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dalam bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.[[22]](#footnote-22)

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Inventarisasi, administrasi, pemanfaatan, dan perlindungan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan untuk permohonan pengalihan dan penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan dokumen, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, dan pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang atau penjamin utang;
4. Menyusun bahan pertimbangan untuk permohonan keringanan waktu dan/atau jumlah utang, usulan pencegahan dan penyanderaan penanggung utang atau penjamin utang, serta menyiapkan data untuk penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan layanan penilaian;
6. Pelaksanaan layanan lelang;
7. Penyampaian informasi terkait kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. Penetapan dan penagihan piutang negara, pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang, dan eksekusi barang jaminan;
9. Pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lainnya;
10. Bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, perlindungan, dan pemanfaatan barang jaminan;
12. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pencatatan penerimaan pembayaran piutang negara serta hasil lelang;
14. Administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

## **Tinjauan Tentang Barang Rampasan Negara**

Salah satu kewenangan dan fungsi penyidikan adalah kemampuan menyita barang bukti. Untuk keperluan pembuktian, khususnya sebagai barang bukti di pengadilan, penyitaan sering kali dibenarkan. Ada kemungkinan suatu perkara tidak dapat disidangkan karena kurangnya barang bukti. Oleh karena itu, penahanan dilakukan oleh penyidik ​​untuk mengumpulkan barang bukti yang akan digunakan selama tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Penyitaan diartikan sebagai tindakan mengambil milik pribadi oleh pemerintah tanpa kompensasi. Proses penegakan hukum mengesahkan penyitaan sebagai tindakan hukum yang melibatkan pengambilalihan dan penguasaan sementara barang-barang milik seseorang atau kelompok untuk tujuan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 1 butir 16 KUHAP mengatur bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukkan dan peradilan.”

Klaim negara atas barang curian, termasuk instrumen, barang bukti, atau barang lainnya, dapat diformalkan melalui perintah pengadilan yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Status barang-barang tersebut berubah menjadi barang sitaan jika dikaitkan dengan perkara yang disita selama proses persidangan untuk membantu pemeriksaan oleh Hakim dan Jaksa. Setelah hakim memutuskan mendukung penyitaan barang-barang tersebut oleh negara, barang-barang tersebut tidak lagi dianggap sebagai milik pribadi, melainkan barang sitaan karena kekuatan hukum yang berlaku lama dari putusan pengadilan. Pemilik asli akan mendapatkan barang-barang yang disita jika tidak dapat dibuktikan bahwa barang tersebut adalah barang curian.

Barang-barang yang dapat disita menurut Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi:[[23]](#footnote-23)

1. Harta benda atau klaim terdakwa yang diyakini diperoleh seluruhnya atau sebagian dari kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan tersebut (ayat (1) huruf a), seperti rumah atau dana bank yang diperoleh dari hasil korupsi.
2. Barang yang secara langsung digunakan dalam melakukan atau mempersiapkan kejahatan (ayat (1) huruf b), seperti senjata pembunuh atau pisau pemotong.
3. Harta benda yang menghalangi penyelidikan kejahatan (ayat (1) huruf c), seperti kendaraan yang digunakan oleh kenalan tersangka untuk menghalangi petugas penegak hukum yang sedang mengikuti tersangka.
4. Barang yang dibuat dengan maksud untuk melakukan kejahatan (ayat (1) huruf d), seperti kunci palsu yang digunakan tersangka untuk masuk ke tempat tinggal.
5. Barang lainnya—sepatu, tas, pakaian, atau pakaian dalam korban—yang ditemukan oleh penyidik ​​yang berhubungan erat dengan kejahatan tersebut (ayat (1) huruf e).
6. Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan dalam perkara perdata atau kepailitan dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dilakukan sesuai dengan ayat 1.

Barang sitaan adalah barang bukti yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap,

dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara:

a. Dimusnahkan.

b. Dibakar sampai habis.

c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.

d. Ditanam di dalam tanah.

e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

f. Dilelang untuk Negara.

g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.

h. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengambilalihan barang dilakukan melalui serah terima dari pihak tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik juga harus meminta pihak tersita untuk membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara penyitaan. Berita acara ini wajib dibuat oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Tindakan penyitaan diizinkan oleh undang-undang untuk kepentingan proses pidana, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama sebagai barang bukti di pengadilan. Tanpa barang bukti, kasus tidak dapat diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, agar kasus lengkap dan sempurna dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Benda sitaan adalah barang yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 PP No. 27 Tahun 1983). Karena proses untuk membentuk Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup lama, dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa, selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan tersebut, benda sitaan dapat disimpan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri, di bank pemerintah, dan dalam keadaan darurat, di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat asal benda sitaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.06/2018, terdapat dua bagian dalam penyelesaian barang rampasan negara, yaitu bagian administrasi dan bagian pengelolaan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal penatausahaan barang rampasan negara. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut berdasarkan Pasal 10 PMK Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara:

* + - * 1. Pertama, melakukan pencatatan dan penatausahaan barang sitaan;
        2. Melindungi barang sitaan milik negara yang dikuasai dari ancaman fisik dan hukum;
        3. Memberikan nasihat kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan, pemindahtanganan, penggunaan, pemusnahan, atau penghapusan;
        4. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui sistem yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, kejaksaan menjual barang sitaan negara melalui lelang. Melalui prosedur penjualan di Bursa Efek yang melibatkan anggota perantara, barang sitaan negara dapat dijual sebagai saham pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek.

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan barang sitaan, barang tersebut harus disimpan di tempat yang ditentukan. Barang yang disita negara untuk digunakan dalam sistem hukumnya dianggap sebagai barang sitaan negara. Barang yang disita disimpan di Tempat Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Sebelum diserahkan ke RUPBASAN, barang sitaan harus dicatat berat dan jumlahnya sesuai dengan Pasal 130 KUHAP. Dokumentasi ini harus mencakup jenis, ciri, lokasi, hari, dan tanggal penyitaan, serta tanda pengenal pemiliknya. Langkah selanjutnya adalah penyidik ​​menandatangani, menyegel, dan membubuhkan stempel pada dokumen tersebut. Barang-barang yang disita wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak seorang pun boleh menggunakannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Kewajiban penyimpanannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat penyidikan dalam proses hukum. Dapat disimpulkan bahwa semua petugas RUPBASAN bertanggung jawab secara administratif dan fisik atas barang-barang yang disita apabila memperhatikan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Hal ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas barang-barang yang disita.

Pejabat yang berwenang yang tingkat pemeriksaannya menentukan tanggung jawab hukum atas barang-barang yang disita. Kewajiban penyimpanan barang-barang yang disita dengan baik berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Tidak seorang pun boleh memanfaatkan barang-barang tersebut. Tujuan pengamanan komoditas sitaan dan aset sitaan milik negara adalah untuk memastikan bahwa barang bukti tetap tidak rusak dan dapat digunakan dalam proses pidana sebagaimana dimaksud. Sejumlah langkah, termasuk penerimaan, terlibat dalam pengelolaan barang sitaan dan barang sitaan negara. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan wajib, Anda harus:

1. Kecuali untuk barang-barang tertentu, RUPBASAN menerima barang sitaan dan barang-barang yang menjadi milik negara.
2. Sebelum mengambil, menyimpan, atau mengambil barang sitaan, petugas RUPBASAN harus memeriksa surat penyitaan, yang meliputi:

Surat pengantar dari instansi yang yang disetujui

Mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Berita acara penyitaan.

1. Terakhir, petugas penerima menggunakan laporan setoran untuk memverifikasi jumlah dan jenis barang yang diterima.
2. Untuk membandingkan barang tidak bergerak yang disita, seperti tanah, rumah, kapal, dan barang bergerak yang tidak termasuk dalam RUPBASAN, dengan barang milik negara yang disita, petugas penerima menyerahkannya kepada petugas penelitian untuk diperiksa. Bekerja sama dengan petugas penelitian dan petugas yang mengajukan dokumen, petugas penerima memverifikasi dokumen dan memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan keberadaan barang yang disita.
3. Petugas berwenang untuk mengambil foto dokumen dan barang sitaan yang belum disimpan di RUPBASAN.
4. Setelah memeriksa, mencocokkan, meneliti, dan memotret barang sitaan, petugas peneliti membuat laporan dengan temuan tertentu.

Proses penyimpanan barang sitaan negara harus dilakukan dengan baik, dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Mengingat keefektifan dalam hal jarak, waktu, administrasi, serta untuk menjamin keutuhan barang sitaan, penulis berpendapat bahwa lebih baik jika penyimpanan barang sitaan negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rupbasan.

1. Sugeng, Bambang & Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Surabaya: Kencana, 2009, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Setyono, Yoni A., *Perkembangan Gugatan dengan Permohonan Provisionil*, Online: https://medianotaris.com/perkembangan\_gugatan\_dengan\_permohonan\_provisionil\_berita647.html, diakses tanggal 30 November 2022, pukul 16.54 wib. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 233.

   6 Ritonga, Francois G., *Gugatan Provisi,* Online : <https://fgrlaw.id/gugatan-provisi/>, diakses tanggal 25 Maret 2024, pukul 22.05 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. Rifai, Eddy & Triyono, Rakhmat, *Eksekusi Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005*, *Jurnal Konstitusi,* Volume 12, Nomor 1, Maret 2015:44-56. [↑](#footnote-ref-6)
7. Prabandaru, Ilham Syahputra, “Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)”, *Journal Diversi,* Volume 4, Nomor 1, April 2018:28-51. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ferdian, “Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang”, *Soumatera Law Review,* Volume 2, Nomor 1, 2019, E-ISSN: 2620-5904. [↑](#footnote-ref-8)
9. Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118”. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mulyadi, Lilik (b). *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 885. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm. 885-886 [↑](#footnote-ref-12)
13. RPH Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Mennagani Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan,* Jakarta: Visi Media, 2012, hlm, 165. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hutagalung Sopar Maru*., Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengkta*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.189. [↑](#footnote-ref-14)
15. S.Mantayborbir Dkk, *Hukum Piutang dan Lelang Negara*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-15)
16. Adwin Tista, “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia”, (Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013), halaman 60. [↑](#footnote-ref-16)
17. I Made Soewandi, *Balai Lelang (Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet)*, Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2005, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kementrian Keuangan, “Balai Lelang Hanya Memberikan Jasa Pra dan Pasca Lelang” (online), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/9934/Balai-Lelang-Hanya-Memberikan> Jasa-Pra-dan-Pasca Lelang.html/, diunduh pada 31 Juli 2024), 201 [↑](#footnote-ref-18)
19. Rachmadi Usman, Hukum Lelang, (Jakarta: Sinar Gramedia, 2019), halaman 85. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*, hal 86. [↑](#footnote-ref-20)
21. Andi Riyanto, Retno Saraswati, Ratna Herawati, “Tugas dan Fungsi Kantor

    Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Lelang”,

    (Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016), hal.3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yohana Blandina, Desie.M.D.Warouw, Meiske Rembang, “Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado Dalam Mengkomunikasikan Sistem Pelelangan Barang Sitaan Melalui Iklan Layanan Masyarakat”, (Journal “Acta Diurna” Volume III, Nomor 2 Tahun 2014, hal. 4. [↑](#footnote-ref-22)
23. R. Soenarto Soerodibroto*, KUHP dan KUHAP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 380 [↑](#footnote-ref-23)